



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#A Fair Chance For All Children

LAPORAN TAHUNAN 2021

DAFTAR ISI

01

Catatan Akhir Tahun
2021 dari Direktur

03

Ringkasan
2021

07

Capaian
Kerja Kami

12

Penelitian
& Publikasi

21

Manajemen
Program

25

Advokasi & Peningkatan
Kapasitas

33

**Program Belajar Kerja
di PUSKAPA Angkatan ke-3**

36

**Berbagi Pengetahuan
& Pembelajaran**

47

**Sumber Daya
di 2021**

49

**Kapasitas
Kelembagaan**

52

**Terima Kasih Banyak,
Mitra PUSKAPA!**

CATATAN AKHIR TAHUN 2021

DARI DIREKTUR



Salah satu bacaan saya di hari terakhir tahun 2021 adalah artikel singkat tentang evolusi desain kamar mandi di rumah-rumah Amerika. Tata letak, bahan yang digunakan, pipa ledeng, di mana kamar mandi ditempatkan di rumah, semuanya berkembang seiring dengan masalah kesehatan masyarakat yang muncul. Ini jelas bukan berita baru bagi kebanyakan dari kita. Sanitasi modern adalah hasil dari pengalaman masyarakat yang mengalami berbagai wabah penyakit dan ingin mencegahnya.

Saya masih selalu terinspirasi oleh bagaimana manusia diperlengkapi untuk “belajar dan belajar ulang” (*learning and unlearning*) demi bertahan hidup dan memperbaiki kehidupan mereka. Begitu orang menyadari bahwa kebersihan dasar dapat mencegah penyakit dan kematian, mereka menciptakan toilet, membangun kamar mandi di dalam rumah, memasang pipa agar air mengalir dengan mudah sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari mereka, dan sebagainya. Menengok ke belakang di tahun 2021, saya bersyukur PUSKAPA tetap intensional dalam belajar dan belajar ulang.

PUSKAPA telah menyelesaikan enam penelitian yang masing-masing membantu kita untuk memahami lebih lanjut soal tata kelola layanan perawatan sosial, situasi anak-anak dan remaja di kota-kota di Indonesia, situasi kepemilikan dan pemanfaatan identitas hukum di daerah kerja kami, lanskap inovasi layanan identitas hukum, dan perkembangan Indonesia terkait Tujuan ke-16 SDGs. Bersamaan dengan itu, ada sejumlah studi berjalan untuk melihat tantangan dan peluang keterlibatan sipil kaum muda dan kewarganegaraan anak perempuan.

PUSKAPA melanjutkan kerja-kerja advokasi, meski masih pandemi. PUSKAPA bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menerjemahkan bukti ke dalam kebijakan untuk menguatkan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua anak dan individu rentan. PUSKAPA juga ambil bagian dalam kolaborasi dan koalisi, mendukung kampanye dan kerja mitra-mitra lama dan baru. Aliansi-aliansi baru tumbuh menguat sementara yang lama terus berkelanjutan.

PUSKAPA juga terus membangun secara kelembagaan lewat penguatan strategi dan tata kelola organisasi. Salah satu yang kami benahi adalah mekanisme untuk mencegah dan menangani pelecehan dan kekerasan berbasis gender dan identitas sosial lainnya. Kerja memelihara organisasi

PUSKAPA tempuh sambil menghadapi pandemi yang belum berakhir dengan segala implikasinya: pada pendanaan, cara kerja, dan kapasitas PUSKAPA sendiri.

Semua itu dimungkinkan oleh kemauan dan kemampuan PUSKAPA untuk belajar dan tekad untuk bertindak berbasis pengetahuan. Juga, dengan kesediaan kami untuk belajar ulang dan melepas cara-cara lama yang meskipun telah terasa nyaman dan akrab justru mungkin tidak efektif dan bahkan berbahaya.

Selain tentang belajar dan belajar ulang, kisah tentang bagaimana kamar mandi diciptakan tadi juga mengingatkan soal ketidaksetaraan. Masih ada orang-orang yang belum bisa menikmati kemajuan pemikiran dan teknologi serta dampak baiknya, termasuk untuk kesehatan. Orang yang lebih mampu saat itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk melindungi diri dari wabah, seperti orang yang lebih mampu sekarang lebih mungkin untuk menghindari tertular Covid-19 dan kurang terdampak secara sosial dan ekonomi dari berbagai pembatasan sebagai konsekuensi pandemi. Melihat kembali ke 2021, saya bersyukur PUSKAPA terus punya fokus pada siapa yang menanggung dampak negatif dalam situasi apa pun dan apa yang dapat memitigasinya.

Secara kolektif, semua orang di PUSKAPA sepakat bahwa untuk bisa bertahan dari ketidakadilan sebelum dan sesudah pandemi, perhatian riset, advokasi, dan layanan harus dicurahkan pada mereka yang menanggung derita terbesar.

Saya pernah membaca di suatu tempat bahwa untuk menanamkan kebiasaan, seseorang harus memiliki dan melakukan tiga hal: niat (*intention*), perhatian (*attention*), dan pengulangan (*repetition*). Tahun 2021 telah sekali lagi meyakinkan saya bahwa PUSKAPA memiliki modal kuat untuk menjadikan “berpikir dan berbuat secara bermakna” sebagai kebiasaan lembaga.

Saya dengan sepenuh hati berharap kita semua selalu punya cukup energi dan daya diri untuk menjadikan kebaikan dan welas asih kebiasaan kita semua di 2022 dan selamanya.

Santi Kusumaningrum
Direktur PUSKAPA



RINGKASAN 2021

Membangun dan Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

6

Penelitian selesai

2

Publikasi jurnal internasional

3

Publikasi bab buku dan kertas kerja

5

Publikasi laporan penelitian

7

Orang mahasiswa magang dan praktikum

Riset PUSKAPA di 2021 dilakukan di

19

Provinsi

&

17

Kabupaten



Menggunakan Ilmu Pengetahuan untuk Mendorong Perubahan

7

Kertas kebijakan dan Ulasan Rutin Peraturan

48

Artikel populer yang ditulis oleh staf PUSKAPA

52

Artikel pemberitaan tentang PUSKAPA di media massa

73

PUSKAPA membantu pelebagaan 73 regulasi di tingkat daerah

521

Kami berkontribusi dalam 521 diskusi/pertemuan kebijakan

377

Kami menjadi pemateri/fasilitator/pelatih/tenaga ahli dalam 377 kegiatan diskusi publik/seminar/lokakarya/pelatihan

Kami berkontribusi dalam

58

kegiatan peningkatan kapasitas

Dan melibatkan

785

peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta OMS

Mengawal Perubahan



Melalui kemitraan bersama Pemerintah Indonesia (melalui Bappenas) dan KOMPAK, PUSKAPA meneruskan advokasi, pendampingan teknis, dan berbagi kapasitas untuk membantu warga rentan mendapatkan hak identitas hukumnya, bisa menggunakannya untuk memperoleh layanan dasar, dan menguatkan penggunaan data warga untuk perancangan dan perbaikan program dan kebijakan di **219 desa yang tersebar di 22 kabupaten dampingan di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.**



Mendukung KOMPAK mereplikasi program di atas ke sekitar **27 Kabupaten** lainnya.



Bersama UNICEF, PUSKAPA melanjutkan advokasi berbasis bukti untuk menguatkan sistem perlindungan anak di Indonesia.



Bersama CPC Learning Network Columbia University, PUSKAPA memperkuat dialog dan pengarusutamaan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi dalam kerja-kerja pemenuhan hak-hak anak di tingkat global.



Bersama CISDI, PUSKAPA mendorong layanan kesehatan primer dan penanganan pandemi Covid-19 bagi kelompok rentan.



Mendukung Implementasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) lewat Sekretariat Nasional AKPSH bersama KOMPAK dan Vital Strategies.



Bersama The London School of Hygiene & Tropical Medicine, PUSKAPA memperkuat program *mentoring* dalam penggunaan pendekatan norma sosial berbasis riset dan advokasi dalam penguatan perlindungan anak.



Bersama ICJR dan IJRS, terlibat dalam rangkaian dialog publik dan memberi masukan pada RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

CAPAIAN KERJA KAMI





Riset untuk membangun pengetahuan dan memperbaiki tindakan

Masalah yang Ingin Kami Atasi	Pendekatan Kami	Hasil di 2021
Data yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyelidiki situasi anak-anak dan kelompok rentan.	PUSKAPA menjalin rangkaian kerja sama untuk menganalisis data-data survei nasional untuk menyelidiki situasi anak-anak dan penduduk rentan.	PUSKAPA melakukan dan menerbitkan laporan studi berjudul “Studi Situasi Anak-Anak dan Kaum Muda di Kota-Kota Indonesia (2021)”
Data yang tersedia belum melingkupi warga yang belum pernah tercatat keberadaannya.	PUSKAPA menjalin rangkaian kerja sama untuk meneliti pertanyaan: siapa yang belum tercakup dalam peta statistik di Indonesia, apa hambatannya, dan bagaimana cara mengatasinya.	<ul style="list-style-type: none"> ● PUSKAPA melakukan dan menerbitkan laporan studi berjudul “Institusi Kuat, Komunitas Tangguh (2021)” ● PUSKAPA melakukan dan menerbitkan laporan studi berjudul “Menyambung Rantai Inklusi (2021)” ● PUSKAPA melakukan dan menerbitkan laporan studi berjudul “Studi Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana (2021)”
Data yang tersedia belum dapat menjelaskan situasi khusus, terutama kekerasan dan diskriminasi.	PUSKAPA melakukan rangkaian kerja sama untuk meneliti dan mengembangkan metode dan etika riset tentang kekerasan dan diskriminasi sambil memperkuat tata kelola data penanganan kasus.	PUSKAPA menjadi bagian dari <i>Advisory Group</i> untuk memberikan masukan terhadap penyusunan agenda riset global tentang keterhubungan antara kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak.

Masalah yang Ingin Kami Atasi	Pendekatan Kami	Hasil di 2021
<p>Data yang tersedia belum mencakup populasi non-rumah tangga tradisional dan yang berada di lembaga-lembaga perawatan atau pemenjaraan.</p>	<p>PUSKAPA melakukan rangkaian kerja sama untuk meneliti dan mengembangkan metode dan etika riset tentang kerentanan dan populasi rentan, khususnya bagi anak-anak yang berada di panti, penjara, dan tempat tinggal non-rumah tangga tradisional lainnya.</p>	<p>PUSKAPA melakukan dan menerbitkan laporan berjudul “Kajian Teknis untuk Memperkuat Program ATENSI”</p>
<p>Data-data tentang anak dan keluarga yang tersedia belum bersifat longitudinal yang mengikuti individu yang sama dari waktu ke waktu.</p>	<p>PUSKAPA melakukan rangkaian kerja sama untuk meneliti dan mengembangkan metode dan etika riset untuk Studi Longitudinal Anak dan Keluarga (SLAK) yang nantinya saling terhubung dengan pangkalan data lain.</p>	<p>Di 2021, PUSKAPA menyusun proposal dan Booklet SLAK yang merangkum perjalanan persiapan SLAK dan menawarkan kepada pemerintah dan lembaga strategis untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita memiliki data tentang kesentosaan dan kesulitan hidup anak dan keluarga di Indonesia yang berkelanjutan.</p>



Advokasi berbasis bukti untuk mendorong perubahan

Masalah yang Ingin Kami Atasi	Pendekatan Kami dan Hasil di 2021
<p>Riset belum sepenuhnya berkualitas, etis, digunakan untuk memperbaiki kebijakan, dan disebarluaskan untuk membangun pengetahuan dunia secara aksesibel.</p>	<p>PUSKAPA bersama Departemen Kriminologi FISIP UI mengembangkan Modul Pembelajaran Daring Perlindungan Anak Dasar (PAD) untuk mengenalkan konsep dan perspektif perlindungan anak dalam memaknai dan mendiskusikan masalah-masalah sosial, dan dalam menjalankan peran profesional sehari-hari.</p>
<p>Tata kelola layanan dasar, dukungan pengasuhan, dan perlindungan khusus belum terpadu, menyeluruh, dan bisa diakses anak dan warga rentan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PUSKAPA terus mendampingi Bappenas untuk penguatan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak, dan mendampingi KPPPA untuk penguatan pencegahan dan penanganan kawin anak, serta survei kekerasan pada anak. ● PUSKAPA tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk klaster riset penduduk rentan. ● PUSKAPA terus mendampingi Sekretariat Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) yang terbentuk berkat Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019 dan mendorong pelaksanaan vaksinasi dan layanan kesehatan bagi warga tanpa dokumen kependudukan.
<p>Administrasi kependudukan belum mencatat semua sejak lahir dan sepanjang hidup dengan inklusif, dan data belum dikelola dengan etis, melindungi privasi, dan akuntabel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PUSKAPA telah melakukan kajian hasil uji coba Program Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) di 259 desa, 12 kabupaten dan 7 provinsi. ● PUSKAPA terus memberikan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada pemerintah daerah, warga sipil, hingga jurnalis untuk mendorong perbaikan layanan administrasi kependudukan secara inklusif.

Masalah yang Ingin Kami Atasi	Pendekatan Kami dan Hasil di 2021
<p>Sistem dan kebijakan belum memberikan kebebasan sipil bagi anak dan kaum muda, serta belum memberi jaminan pendampingan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi di dalam dan di luar sistem peradilan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PUSKAPA terus terlibat aktif dalam berbagai advokasi koalisi/aliansi masyarakat sipil, seperti Aliansi Reformasi RKUHP, Koalisi KUHAP, Koalisi RUU TPKS dan Koalisi Advokasi PDP. ● PUSKAPA tengah membantu penyusunan Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan keadilan restoratif.
<p>Partisipasi anak-anak dan kaum muda masih tokenistik, adhoc, dan eksklusif, serta belum sepenuhnya bermakna untuk membangun keterlibatan dan kewargaan sipil sejak dini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PUSKAPA telah menyusun <i>discussion paper</i> yang untuk menyoroti dan mewakili suara dan aspirasi anak-anak dan kaum muda yang tinggal di kota sebagai masukan terhadap delegasi U20 dalam G20. ● Di tahun 2021, PUSKAPA memulai penulisan manuskrip menggunakan hasil studi Girls Citizenship agar dapat diterbitkan di jurnal internasional. ● PUSKAPA sedang menyelesaikan riset tentang keterlibatan sipil kaum muda di Indonesia secara umum dan khususnya di gerakan pro-iklim dan lingkungan hidup.



PENELITIAN & PUBLIKASI

Penelitian Berjalan 2021



1 Studi Memahami Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Iklim dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Laporan akan rampung pada pertengahan Juli 2022

Secara umum, studi ini dilakukan untuk memahami aksi-aksi kaum muda terkait isu iklim dan lingkungan, mengidentifikasi faktor pendorong keterlibatan kaum muda, serta menggali model-model sukses keterlibatan kaum muda yang berdampak pada perubahan norma sosial dan kebijakan.

2 Studi Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati/PASH

(PUSKAPA - KOMPAK)

Laporan rampung pada Juni 2022

Secara umum, studi ini dilakukan untuk menyajikan analisis dan ringkasan yang koheren tentang apa yang telah terjadi selama tujuh tahun terakhir Program PASH dan menilai posisi capaian dari teori perubahan program yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

3 Kajian Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

(PUSKAPA, Bappenas, Kemenkumham, dan UNICEF)

Laporan akan rampung pada pertengahan 2022

Secara umum, studi ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendampingan dan rehabilitasi diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4 Konsultasi dengan Kaum Muda dan Penyusunan Kertas Posisi untuk Forum G20

(PUSKAPA, Bappenas, Kemendagri, dan UNICEF)

Kertas posisi rampung pada Maret 2022

Secara umum, konsultasi dengan kaum muda dan penyusunan kertas posisi dilakukan untuk memberikan masukan bagi delegasi Indonesia dalam pertemuan/forum G20.

5 Kajian Teknis untuk Memperkuat Program ATENSI

(PUSKAPA, Bappenas, Kemensos, dan MAHKOTA)

Laporan kajian rampung pada Februari 2022

Secara umum, kajian ini dilakukan untuk mempersiapkan dukungan yang tepat bagi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kemensos dengan melihat kesiapan pelaksanaan Program ATENSI, mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul, dan menyusun rencana mitigasi. Selain itu kajian juga bertujuan untuk menyediakan gambaran objektif tentang program ATENSI dan pengaturan pelaksanaannya, serta mengamati secara umum keberadaan Program ATENSI dalam keseluruhan sistem kesejahteraan sosial di Indonesia dan merekomendasikan perbaikan tata kelola dan penyediaan layanan.

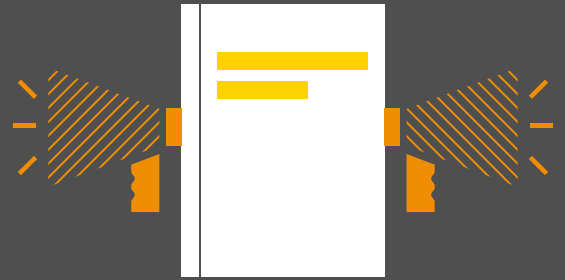
6 Mendokumentasikan Pembelajaran Inovasi CRVS di Indonesia: Menampilkan Kelayakan Sistem CRVS yang Inklusif dan Akuntabel

(PUSKAPA - World Bank)

Laporan rampung pada 2021 dan tidak dipublikasikan untuk umum

Studi ini bertujuan untuk menginformasikan Pemerintah Indonesia tentang inovasi seputar sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (CRVS) untuk memperkuat penyelenggaraan layanan kesehatan dan sosial. Studi ini menyintesis serangkaian pembelajaran lengkap dari inisiatif penguatan CRVS di tingkat nasional dan sub-nasional di Indonesia.

Publikasi Laporan Penelitian



1 Institusi Kuat Komunitas Tangguh: Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan, dan Hasil dari Layanan Dasar Administrasi Kependudukan, Pendidikan, dan Kesehatan



(Bappenas-PUSKAPA-KOMPAK-SurveyMETER)

Laporan diluncurkan bersama Bappenas dan KOMPAK pada Juni 2021. Saksikan rekaman video peluncuran laporan tersebut [di sini](#).

Laporan studi ini bertujuan untuk mengetahui situasi tata kelola dan penyediaan layanan adminduk serta kaitannya dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Studi ini juga dilakukan sebagai dasar bagi penyesuaian dan perbaikan program ke depannya karena dirancang untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang perubahan yang terjadi antara 2015 dan 2019.

2 Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia



(Bappenas-PUSKAPA-KOMPAK)

Laporan diluncurkan secara terbatas pada Maret 2021.

Studi ini mengidentifikasi siapa saja kelompok rentan adminduk, karakteristik kerentanannya, dan hambatan yang mereka alami selama ini melalui tinjauan berbagai dokumen dan literatur. Studi ini juga membaca praktik-praktik baik adminduk dan menganalisisnya sebagai dasar rekomendasi agar sistem adminduk semakin inklusif dan mencatat semua orang tanpa terkecuali.

3 Layanan Adminduk dalam Situasi Bencana



(Bappenas-PUSKAPA-KOMPAK)

Laporan diluncurkan secara terbatas pada Maret 2021.

Laporan kajian ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar menguatkan tata kelola kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Indonesia berdasarkan studi kasus bencana gempa di Kabupaten Lombok dan Kabupaten Sigi tahun 2018.

4 Buku Pegangan Partisipasi Anak dalam Penelitian di Indonesia



(PUSKAPA-CPC Learning Network)

Buku pegangan diluncurkan bersama CPC Learning Network, UNICEF dan didukung oleh The Conversation Indonesia pada Juli 2021. Saksikan rekaman video peluncuran buku pegangan tersebut [di sini](#).

Buku pegangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai cara-cara etis dalam melibatkan anak-anak dalam penelitian Anda di Indonesia dan bagaimana agar anak-anak dapat berpartisipasi secara bermakna dalam penelitian Anda.

5 Situasi Anak-Anak dan Kaum Muda di Kota-Kota Indonesia



(Bappenas-PUSKAPA-UNICEF)

Laporan diluncurkan bersama Bappenas dan UNICEF, serta didukung Kemendagri pada Desember 2021. Saksikan rekaman video peluncuran laporan tersebut [di sini](#).

Laporan studi ini bertujuan untuk melihat karakteristik, kesejahteraan, dan pengalaman hidup anak-anak dan kaum muda sebagai masukan agar kebijakan dan program untuk mewujudkan mitos peluang di kota menjadi suatu kenyataan bagi semua anak dan kaum muda, terutama mereka yang terpinggirkan.

6 Voluntary National Review (VNR) Tujuan 16



Laporan VNR Indonesia 2021 diluncurkan oleh sekretariat SDG's pada Juni 2021.

Dalam membantu penyusunan Voluntary National Review (VNR) atau laporan capaian dan kemajuan pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan (*Goal*) 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, PUSKAPA terlibat sebagai kontributor, diantaranya memberikan masukan teknis dan strategis, penyusunan draf, pertemuan konsultasi, mengumpulkan data dan menyusun pesan kunci. Pada laporan VNR sebelumnya, tahun 2019, PUSKAPA juga telah membantu Sekretariat SDGs dalam penyusunannya.



Publikasi Artikel Jurnal

Anjalee Kohli, Ni Luh Putu Maitra Agastya, Ben Cislighi & Marie-Celine Schulte (2021). Special Symposium: Social and gender norms and violence against children: exploring their role and strategies for prevention. *Global Public Health*, 16:6, 815-819. DOI: 10.1080/17441692.2021.1921240

Kusumaningrum, S., Siagian, C., & Beazley, H. (2021). Children during the COVID-19 pandemic: Children and young people's vulnerability and wellbeing in Indonesia. *Children's Geographies*, 1-11. <https://doi.org/10.1080/14733285.2021.1900544>

Publikasi Bab Buku dan Kertas Kerja

Kusumaningrum, S., Sari, W. L., Handayani, S. A., Usman, R. (2021). Registration Strengthening Program in Indonesia (Health Care/International). In M.A. Bond, S. Tamim, S.J. Blevins, B.R. Sockman. *Systems Thinking for Instructional Designers: Catalyzing Organizational Change* (chapter 24). DOI: 10.4324./9781003028772-29

Kusumaningrum, S., Patunru, A. A., Siagian, C., Bennouna, C. A Child's Growth is a Nation's Growth: Children's Wellbeing and Inequality in Indonesia. In R. Barichello, A. A. Patunru, R. Schwindt. *Globalization, Poverty, and Income Inequality: Insights from Indonesia* (chapter 5). UBC Press, 2021

Kusumaningrum, S., Sari, W. L., Siagian, C., Adhi, A. A., Tiekens, S., Sahputra, F., & Santiya, J. W. (2021). *Social Research in the time of the Pandemic—Impact of the COVID-19 pandemic on research about, for, and with children and vulnerable populations* [Working Paper]

Publikasi di Media Populer



Detik.com

Muhammad Jaedi

Vaksinasi dan Problem Kepemilikan Dokumen Kependudukan (op-ed)

Magdalene

- **Widi Laras Sari, Harriz Jati, Meutia Aulia Rahmi, Santi Kusumaningrum**

Pencatatan Sipil Belum Merata, Akses Bagi Kelompok Rentan Terbatas (op-ed)

- **Marsha Habib, Ni Luh Putu Maitra Agastya**

Anak Meninggal Karena Ruqyah, Kesalahan Ada Dimana? (wawancara tertulis)

Relatif Perspektif

Andrea Adhi

Eps. Spesial Seri Sekolah Pandemi: Nasib Kelompok Rentan (PART 1) bersama PUSKAPA (op-ed)

Kompas.id

Santi Kusumaningrum

Pastikan Pendampingan Sosial bagi Anak Yatim Piatu karena Covid-19 (op-ed)

Narasi Newsroom

Ryan Febrianto

Reality Bites: Waduh... "Suara Anak Muda Sekadar Gimik Pemerintah"? (wawancara)

RRI

Putri Kusuma Amanda

Lintas Jakarta Sore: Perkawinan Anak, Masih Ada? (wawancara)

SEA Today News (Southeast Asia Today)

Andrea Adhi

Talkshow dengan Tema Perkawinan Anak (wawancara)

Sekolah Non Formal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (SNF FEB UI)

Muhammad Bill Robby

SNF Educast "Hukuman Kebiri Kimia dan Payung Hukum Kekerasan Seksual Anak" (podcast)

The Conversation

- Ryan Febrianto**
 Belajar dari Clubhouse: bagaimana membangun ruang diskusi digital yang inklusif? (op-ed)
- Widi Laras Sari, Harriz Jati, Meutia Aulia Rahmi, Santi Kusumaningrum**
 Mereka yang tidak tercatat: rapuhnya pondasi pencatatan sipil di Indonesia (op-ed)
- Widi Laras Sari, Harriz Jati, Meutia Aulia Rahmi, Santi Kusumaningrum**
 The unregistered: the fragile foundations of civil registration in Indonesia (op-ed)
- Ryan Febrianto, Santi Kusumaningrum, Andrea Adhi, Ni Luh Putu Maitra Agastya**
 Bansos tak cukup atasi dampak COVID-19, saatnya pemerintah perkuat sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial (op-ed)
- Clara Siagian, Cendy Adam, Feri Sahputra, Santi Kusumaningrum**
 Keroposnya perlindungan data kependudukan dan ketimpangan layanan publik (op-ed)
- Wenny Wandasari, Santi Kusumaningrum, Widi Laras Sari**
 Riset ungkap faktor ekonomi, sosial, dan tata kelola sistem hambat warga untuk dapatkan dokumen kependudukan dan tawarkan solusi (op-ed)
- Wenny, Santi, Widi**
 Structural barriers and governance factors block Indonesian getting identity documents — but there are solutions (op-ed)
- Windy Liem, Andrea Adhi, Putri Amanda**
 Indonesia darurat (data) kekerasan terhadap anak (op-ed)
- Clara Siagian, Marsha Habib, Santi Kusumaningrum**
 "Bagaimana melibatkan anak-anak secara bermakna dalam penelitian? (op-ed)
- Clara Siagian, Marsha Habib, Santi Kusumaningrum**
 Merancang metode yang tepat untuk penelitian yang melibatkan anak (op-ed)
- Clara Siagian, Marsha Habib, Santi Kusumaningrum**
 How to meaningfully involve children in research (op-ed)
- Clara Siagian, Marsha Habib, Santi Kusumaningrum**
 How to design appropriate methods for research involving children (op-ed)
- Rahmadi Usman, Marsha Habib, Santi Kusumaningrum, Widi Laras Sari**
 Memperbaiki sistem administrasi kependudukan di Indonesia harus mulai dari desa (op-ed)
- Rahmadi Usman, Marsha Habib, Santi Kusumaningrum, Widi Laras Sari**
 Improving the civil registry and vital statistics system in Indonesia must begin at the village level (op-ed)
- Muhammad Bill Robby, Putri Kusuma Amanda, Marsha Habib**
 Tiga cara sistem pendidikan Indonesia bisa berperan mencegah radikalisme dan ideologi kekerasan (op-ed)
- Ryan Febrianto, Nadira Irdiana, Siti Ainun Nisa dan Yudi Setiawan**
 Kaum muda diremehkan di panggung politik: kita perlu dorong peran dan pengakuan mereka sebagai pemimpin dan politikus (op-ed)
- Windy Liem, Santi Kusumaningrum**
 Klaim herd immunity di Jakarta berbahaya: 2 juta anak belum divaksin dan belum aman dari ancaman COVID (op-ed)
- Marsha Habib, Clara Siagian, Santi Kusumaningrum**
 Penghapusan syarat NIK langkah awal atasi kesenjangan vaksinasi (op-ed)

- **Marsha Habib, Clara Siagian, Santi Kusumaningrum**

Scrapping ID number requirement can be the first step in overcoming Indonesia's vaccine gap (op-ed)

- **Windy Liem, Andrea Adhi, Putri Kusuma Amanda**

Meneliti kekerasan secara beretika? Yuk, bisa yuk! (op-ed)

Tirto.id

- **Santi Kusumaningrum**

Siksa Kebiri Bukan Solusi Memerangi Kejahatan Seksual terhadap Anak (wawancara)

- **Nadira Irdiana**

Betapa Berbahaya Kampanye Nikah Usia Anak ala Aisha Weddings (wawancara)

- **Ni Luh Putu Maitra Agastya**

Kisah yang Tak Tercatat Negara: Menjadi Yatim Piatu karena Covid-19 (wawancara)

Talking Indonesia Melbourne University

Santi Kusumaningrum

Talking Indonesia on Policy Paper Covid-19 dan Child Participation (podcast)

abc.net

Santi Kusumaningrum

Indonesia approves regulation to chemically castrate paedophiles. How effective will it be? (wawancara)

End-Violence

Santi Kusumaningrum

Nearly 1 in 6 Indonesian children is undocumented. How do we change that? (podcast)

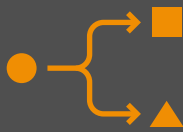
MANAJEMEN PROGRAM



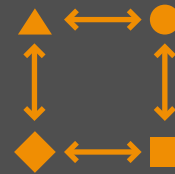
Sorotan Manajemen Program

PUSKAPA mengelola program melalui tahap konseptualisasi, desain, dan penerapan kegiatan. Manajemen/pengelolaan program berlangsung selama beberapa tahun yang keluarannya akan berkontribusi langsung terhadap penyelesaian masalah yang dialami oleh anak dan kelompok rentan.

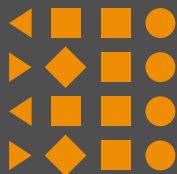
Manajemen Program oleh PUSKAPA mencakup:



Penyusunan strategi dan pengaturan sumber daya yang ada di dalam maupun luar PUSKAPA untuk bekerja sama mencapai tujuan Program.



Koordinasi dengan mitra dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari cara meningkatkan dampak Program.



Identifikasi dan mengelola berbagai risiko untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas yang merupakan bagian yang melekat dalam jalannya Program, seperti perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi atau kejadian-kejadian geografis yang dapat mempengaruhi hasil Program.



Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk melacak perubahan, memberitahukan perubahan arah, dan meningkatkan perencanaan program di masa depan.

1

PASH Inklusif dan Akuntabel Kemitraan dengan KOMPAK 2015-2022

Program ini telah berjalan sejak 2015 bekerja sama dengan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia melalui program KOMPAK. Program ini tetap konsisten membawa pesan untuk membantu Pemerintah Indonesia memperkuat layanan dan sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H). Kami percaya bahwa sistem PS2H yang berjalan secara inklusif, efektif dan akuntabel dapat menguatkan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi) serta memastikan alokasi sumber daya disusun dengan basis data yang akurat, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Prioritas Kami pada tahun 2021 adalah memastikan tersedianya sumber daya dan kebijakan yang mendukung layanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten hingga ke desa, serta membangun mekanisme pemanfaatan data administrasi kependudukan (adminduk) untuk perencanaan pembangunan. Layanan inklusif juga dapat dicapai apabila penyedia layanan dibekali dengan panduan dan kapasitas yang memadai untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang lebih sulit untuk mengakses layanan. Bersama-sama dengan KOMPAK, Kami juga ingin memastikan perangkat pelembagaan dan replikasi tersedia secara memadai di wilayah-wilayah dampingan Kami menjelang berakhirnya program pada tahun 2022.

2

Asistensi Teknis untuk Mendukung Implementasi Stranas AKPSH

Kemitraan dengan Vital Strategies 2021-2023

Tahun 2021 menjadi momentum awal penguatan kolaborasi antara PUSKAPA, Vital Strategies, dan Bappenas untuk mendukung implementasi Strategi Nasional AKPSH, utamanya pada aspek pencatatan kelahiran, pencatatan kematian dan penyebab kematian, serta pengolahan data statistik hayati. Berbagai rangkaian pertemuan peningkatan kapasitas dan rencana kerja sudah diselenggarakan untuk memastikan implementasi program berjalan dengan lancar di tahun 2022-2023.

Kolaborasi ini menyepakati tiga pendekatan utama, yaitu: 1) pemetaan kebijakan dan proses bisnis pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian; 2) dukungan teknis perbaikan proses bisnis pencatatan kelahiran, kematian, dan penyebab kematian; dan 3) dukungan teknis penyusunan strategi pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data statistik hayati.

3

Memperkuat Pembangunan Institusional melalui Kemitraan antar Universitas untuk Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak

Kemitraan dengan CPC Learning Network-Columbia University 2009-2023

Sejak PUSKAPA pertama kali terbentuk, PUSKAPA melanjutkan kolaborasi yang terus menguat dengan Columbia University. Bersama-sama dengan CPC Learning Network, PUSKAPA melanjutkan berbagai program untuk memastikan pendekatan hak anak dan kualitas hidup anak menjadi prioritas

pembangunan Pemerintah Indonesia, dan memastikan semua anak, khususnya yang paling mengalami kesulitan hidup, mendapatkan hak dan dukungan yang dibutuhkan. Melalui kolaborasi ini, PUSKAPA menerbitkan Buku Pegangan Partisipasi Anak di Indonesia.

4

Kemitraan Strategis untuk Kebijakan Sosial dan Perlindungan Anak

Kemitraan dengan UNICEF Child Protection 2021-2023

PUSKAPA melanjutkan kolaborasi yang telah terbangun sejak 2014 dengan UNICEF. Pengelolaan program pada periode ini berfokus pada berbagai upaya untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti untuk merespons risiko anak terhadap ketimpangan, kurangnya kualitas pengasuhan, dan risiko anak terhadap kekerasan. Kami melihat pentingnya mengolah bukti untuk kemudian diangkat menjadi rekomendasi kebijakan dan bahan dialog publik. Kami juga melihat pentingnya memastikan adanya kerangka kerja yang memadai di sektor administrasi kependudukan, kesejahteraan sosial dan sistem peradilan, serta pentingnya berbagai upaya peningkatan kapasitas untuk penguatan layanan perlindungan untuk anak di tingkat Pusat dan Daerah.

Selama tahun 2021, PUSKAPA mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyusun peta jalan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. PUSKAPA juga mendukung berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Sahabat Kapas, dalam program peningkatan kapasitas kaum muda pada isu perlindungan dan inklusi sosial, administrasi kependudukan dan statistik hayati, serta akses pada keadilan. PUSKAPA juga tengah mengembangkan berbagai perangkat peningkatan kapasitas berbasis keahlian seperti teknik advokasi, cara berpikir kritis, dan panduan penyusunan kertas kebijakan.

ADVOKASI & PENINGKATAN KAPASITAS



Advokasi

1

Seri Diskusi Bedah Kerentanan COVID-19

30 JAN 2021 & 25 FEB 2021

#BEDAHKERENTANAN #BertakanPerbaikanLayananSosial

Media Briefing Perkuat Peran Sektor Sosial dan Pemerintah Daerah di Masa Pandemi

PEMBICARA

DEWATI SUTISNA
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

DIHAH SAMUDIRAH
Senior Advisor on Gender and Youth, UNICEF dan Pendiri CSEI

SANTI RAHMADANGRUM
Direktur PUSKAPA

MAYDOP ERIYNA
Jurnalis KOMPAS TV

MODERATOR

Didukung oleh: THE CONVERSATION Indonesia

25 KAMIS, 25 FEBRUARI 2021
14.00-15.45 WIB

Tap/klik gambar di atas untuk menyaksikan video rekaman kegiatan.

Sebagai tindak lanjut peluncuran Kajian Kebijakan: Berkejaran dengan Waktu untuk Mengatasi dan Mencegah Dampak COVID-19 pada Anak dan Individu Rentan pada 2020 lalu, PUSKAPA, dengan dukungan KOMPAK dan UNICEF menyelenggarakan kegiatan seri diskusi Bedah Kerentanan seri pertama dan kedua secara daring pada bulan Januari dan Februari 2021. Seri diskusi Bedah Kerentanan bertujuan untuk menyebarkan gagasan pokok, meningkatkan *media awareness*, dan mempertajam enam rekomendasi kajian kebijakan tersebut dengan mempertemukan perspektif dari K/L dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Seri diskusi Bedah Kerentanan diselenggarakan oleh PUSKAPA dan didukung oleh KOMPAK dan UNICEF. Pada seri kedua, media The Conversation Indonesia dipilih menjadi mitra media kegiatan.

2

Peresmian Pokja Stranas AKPSH dan Diseminasi Studi Dukyandas

23 JUN 2021



SEMINAR PUBLIK

Peresmian Kelompok Kerja Stranas AKPSH & Penyampaian Studi Administrasi Kependudukan dan Layanan Dasar

Rabu, 23 Juni 2021 | **08.30-12.00 WIB** | Tersedia penerjemah dan juru bahasa isyarat.

Pungky Sumadi <small>Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas</small>	Zudan Fakrulloh <small>Dejen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri</small>	Dan Woods <small>Counsellor Human Development Section-DFAT</small>	Muhammad Cholifihani <small>Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas</small>	Akhmad Tavipiyono <small>Pit. Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri</small>	Eva Rahma Kasim <small>Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kemensos</small>	Bito Wikantosa <small>Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kemendesa</small>	Anna Winoto <small>Team Leader KOMPAK</small>

Tap/klik gambar di atas untuk menyaksikan video rekaman kegiatan.

Pada tanggal 23 Juni 2021, Bappenas bersama-sama PUSKAPA dan KOMPAK menyelenggarakan kegiatan peluncuran laporan studi administrasi kependudukan dan pelayanan dasar (Dukyandas) berjudul "Institusi Kuat, Komunitas Tangguh" bersamaan dengan peluncuran Pokja Stranas Administrasi Kependudukan dan Penguatan Statistik Hayati (AKPSH). Adapun yang menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut adalah Pungky Sumadi (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas), Zudan Arif Fakrulloh (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kemendagri), Dan Woods (Counsellor Human Development Section, DFAT), Muhammad Cholifihani (Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas), Akhmad Sudirman Tavipiyono (Plt. Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri), Sri Wahyuni (Koordinator Fasilitasi Pelayanan Pendidikan dan Pengembangan Modal Sosial Budaya Masyarakat, Dit. Pengembangan Sosial Budaya, Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kemendesa) dan Evi Rahmi Kasim (Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kemensos).

Studi Dukyandas menunjukkan bahwa, meskipun telah banyak pencapaian yang dicapai, beberapa tantangan pada sistem adminduk masih ditemukan. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa beberapa responden dalam penelitian masih belum memiliki dokumen identitas hukum, sebagian besar karena terkendala biaya dan waktu.

Kegiatan peluncuran studi dan Pokja Stranas AKPSH yang dilakukan secara daring tersebut diikuti oleh 489 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga, media, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan. Sebanyak tiga media daring nasional meliput kegiatan tersebut.

3

Advokasi PUSKAPA dalam Revisi Undang-Undang ITE

29 APR 2021

KERTAS KEBIJAKAN Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE



Tap/klik gambar di atas untuk mengunduh kertas kebijakan.

PUSKAPA bergabung dengan sebuah koalisi CSO untuk kebebasan sipil melalui perbaikan advokasi UU ITE. Koalisi ini memantau, menganalisis, dan mengadvokasi dampak perubahan kebijakan terhadap kebebasan sipil dan kriminalisasi kelompok tertentu. Pada April 2021, koalisi mengadakan acara peluncuran kertas kebijakan yang disusun bersama-sama dengan anggota koalisi, termasuk PUSKAPA.

4

Advokasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

06 MEI 2021

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

DIALOG MASYARAKAT

RKUHP: Hukum Untuk Siapa?

PEMBICARA

- Gita Putri Damayana - Direktur Eksekutif PSHK
Partisipasi Publik dan Kritik Keterbukaan Proses Pembahasan RKUHP
- Khotimun Sutanti - Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia
Dampak RKUHP terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan lainnya
- Asfinawati - Ketua Umum YLBHI
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Perlindungan Masyarakat Adat dan Potensi Aturan Diskriminasi
- Feri Sahputra - Koordinator Akses Pada Keadilan PUSKAPA
Dampak RKUHP terhadap Program Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah
- Wahyudi Djafer - Direktur Eksekutif ELSAM
RKUHP dan Ancaman pada Demokrasi
- Maidina Rahmawati - Manajer Program ICJR
RKUHP dan Proyek Penyelesaian Masalah Overcrowding Lapas

Moderator:

- Dio Ashar Wicaksana
Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

**Kamis, 6 Mei 2021
10.00 - 12.30 WIB**

**Live Streaming
ICJR ID**

Tap/klik gambar di atas untuk menyaksikan video rekaman kegiatan.

Sejak 2018, PUSKAPA tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Aliansi ini melakukan kerja-kerja untuk memastikan RKUHP melindungi dan tidak mengkriminalisasi kelompok tertentu. Selama 3 tahun belakangan, PUSKAPA bersama Aliansi menghasilkan beberapa kertas kebijakan, produk kampanye, diskusi, dan seminar publik.

Kegiatan terakhir yang dilakukan PUSKAPA bersama Aliansi tersebut adalah dialog publik dimana Feri Sahputra, Lead for Access to Justice PUSKAPA menjadi salah satu pembicaranya. Dalam acara ini Feri menjelaskan tentang target-target pembangunan yang kemungkinan terhambat jika RKUHP disahkan dengan tetap membawa pasal-pasal yang mengkriminalisasi.

5

Memo Kebijakan Kementerian Kesehatan

22 JAN 2021



Tap/klik gambar di atas untuk membaca.

Dalam rangka mendorong akselerasi pencapaian keberhasilan penanganan wabah pandemi COVID-19, PUSKAPA bersama-sama dengan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Laporan COVID19 menerbitkan memo kebijakan yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan terkait, salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Dalam memo kebijakan tersebut, kerja bersama lintas kementerian teknis dan kementerian koordinator menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia.

6

Dukungan Teknis untuk Penguatan Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH)

Di tingkat nasional, PUSKAPA dan KOMPAK memberikan dukungan teknis kepada Bappenas dalam mengimplementasikan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) melalui sekretariat nasional yang telah dibentuk. 2 (dua) tenaga ahli Seknas AKPSH telah direkrut dan berbagai pertemuan koordinasi antar lembaga telah dilakukan. Melalui Pokja Identitas Hukum, PUSKAPA juga mendukung diskusi dan advokasi untuk perubahan UU Adminduk.

Melalui kerja sama dengan KOMPAK, PUSKAPA juga memberikan dukungan teknis kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan menyusun Panduan Fasilitasi Perlindungan Sosial di Desa (Panduan Perlinsos). Panduan tersebut merupakan satu dari 11 (sebelas) panduan yang tengah dikembangkan oleh Kemendes PDTT untuk mendukung pelaksanaan SDGs Desa. Panduan Fasilitasi Perlindungan Sosial di Desa disusun untuk merespon kebutuhan desa untuk mengenali kewenangan dan perannya dalam melayani

kebutuhan perlindungan sosial di desa secara luas. Panduan tersebut disusun untuk membantu desa dalam menyelenggarakan perlindungan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan Posyandu di desa. Panduan ini berbagi pengetahuan praktis bagi desa untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan perlindungan sosial, terutama bagi penduduk yang paling membutuhkan atau yang paling rentan.

PUSKAPA juga telah menyusun Pedoman Teknis Pendataan Kelompok Rentan Adminduk. Pedoman ini merupakan pedoman untuk pendataan individu atau kelompok yang sulit mendapatkan dokumen kependudukan akibat terhalang oleh akses, sistem dan layanan yang kurang responsif, dan bahkan perlakuan yang diskriminatif. Pedoman Teknis Pendataan Kelompok Rentan ini merupakan kelanjutan dari Studi Kerentanan yang mengklasifikasikan 12 kelompok rentan adminduk berdasarkan 3 lapis kerentanan yaitu kerentanan akibat terhambatnya akses, kerentanan akibat layanan yang kurang responsif, dan kerentanan

Di tingkat subnasional, PUSKAPA juga mendukung pemerintah daerah untuk menyusun rencana teknis dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petugas yang membantu proses pencatatan sipil di wilayah KOMPAK. Pada April - Juni 2021 ini, PUSKAPA menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk pelatih (TOT) fasilitator PASH, antara lain di Pemalang (Jawa Tengah), Trenggalek, Lumajang (Jawa Timur), Jayapura (Papua) dan Manokwari Selatan (Papua Barat). Pelatihan pada tingkat provinsi juga dilakukan di NTB dan Sulawesi Selatan.

Pendampingan terhadap pemerintah daerah juga dilakukan dalam pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi untuk Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Serangkaian lokakarya telah diselenggarakan untuk mengembangkan dan menguji instrumen pemantauan tersebut, antara lain di Brebes (Jawa Tengah), Bondowoso (Jawa Timur), Bantaeng, dan Pangkep (Sulawesi Selatan). Di NTB, pengembangan dan uji coba instrumen pemantauan dan evaluasi juga dilakukan untuk pelaksanaan program percepatan kepemilikan identitas hukum melalui kerja sama lintas sektor.

PUSKAPA terlibat dalam penyusunan regulasi untuk aplikasi SIKAT di Lumajang (Jawa Timur) dan SIKAB di Pacitan (Jawa Timur) terkait dengan upaya mendukung pengembangan sistem informasi yang dapat menghubungkan data administrasi kependudukan dan sektor lainnya. Selain itu, PUSKAPA juga mendukung penyusunan regulasi tentang pelaksanaan peraturan daerah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan di Lumajang (Jawa Timur). Dukungan penyusunan regulasi juga dilakukan di Lombok Barat dan Lombok Tengah (NTB).

Selain itu, PUSKAPA juga memberikan dukungan teknis untuk pengembangan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk pelayanan adminduk di Trenggalek dan Lumajang (Jawa Timur). Terkait penganggaran untuk layanan adminduk, PUSKAPA juga mendukung diskusi mengenai rencana penganggaran Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Brebes, Pemalang, Pekalongan (Jawa Tengah), Lombok Utara, dan Lombok Timur (NTB).

7

Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kolaborasi dengan ICJR dan IJRS

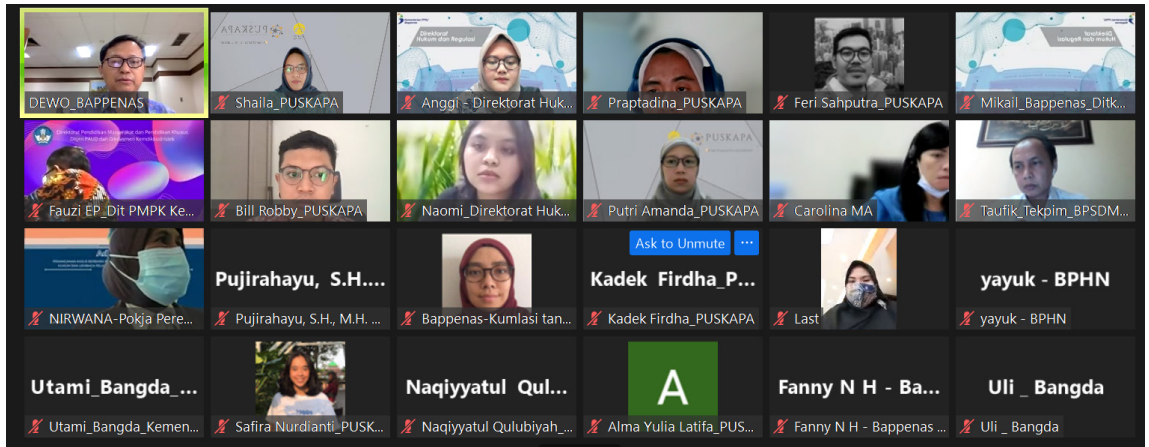
Sejak 2016, koalisi masyarakat sipil telah mengadvokasi RUU untuk mencegah, merespons, dan memperkuat penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual. DPR menetapkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai salah satu prioritas mereka pada tahun 2021.

PUSKAPA berkolaborasi dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) untuk mengembangkan policy brief untuk memberikan masukan terhadap RUU tersebut. Fokus utama kami adalah bahwa Undang-Undang itu sendiri harus mengakomodasi peraturan yang lebih jelas mengenai tindak pidana, prosedur penegakan hukum, dan memastikan perlindungan dan bantuan kepada korban kekerasan seksual.

Kami juga menyoroti perlunya mengakomodasi peraturan terkait peran pemerintah daerah dalam merespons dan mencegah kasus kekerasan seksual. Kami bekerjasama dengan ICJR dan IJRS memantau posisi RUU di lembaga legislatif DPR. Beberapa pertemuan diadakan untuk memperbarui situasi advokasi dan mengembangkan materi advokasi.

8

Penyusunan Peta Jalan Implementasi UU SPPA



PUSKAPA memberikan bantuan teknis kepada Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas untuk menyusun Peta Jalan dalam penguatan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. PUSKAPA telah mengembangkan metode untuk mengembangkan Peta Jalan dengan melakukan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi situasi terkini sistem peradilan anak di Indonesia dan melakukan serangkaian FGD dan wawancara dengan pemangku

kepentingan terkait. Pada 2021, PUSKAPA melakukan FGD untuk mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan SPPA yang melibatkan 141 peserta yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan CSO dari 10 provinsi.

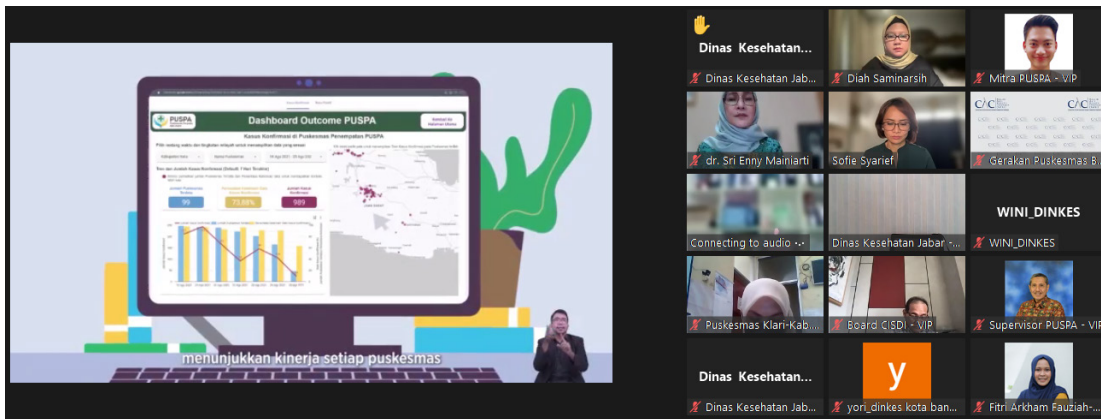
Dokumen Roadmap SPPA sedang disusun dan akan didiseminasikan bersama-sama Bappenas pada kuartal kedua 2022.

9

Kolaborasi PUSKAPA-CISDI untuk Penguatan Layanan Kesehatan Primer



PUSKAPA berkolaborasi dengan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives (CISDI) dalam Program Pencerah Nusantara Puskesmas Responsif-Inklusif dan Masyarakat Aktif (PN PRIMA). Program ini dirancang bersama-sama Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bandung di bawah arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.



Proses perancangan program melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta perwakilan kelompok rentan yang menjadi sasaran Program PN Prima. Proses ini dilakukan selama Agustus - Desember 2021 melalui berbagai FGD dan pertemuan daring/luring di ketiga kabupaten/kota.

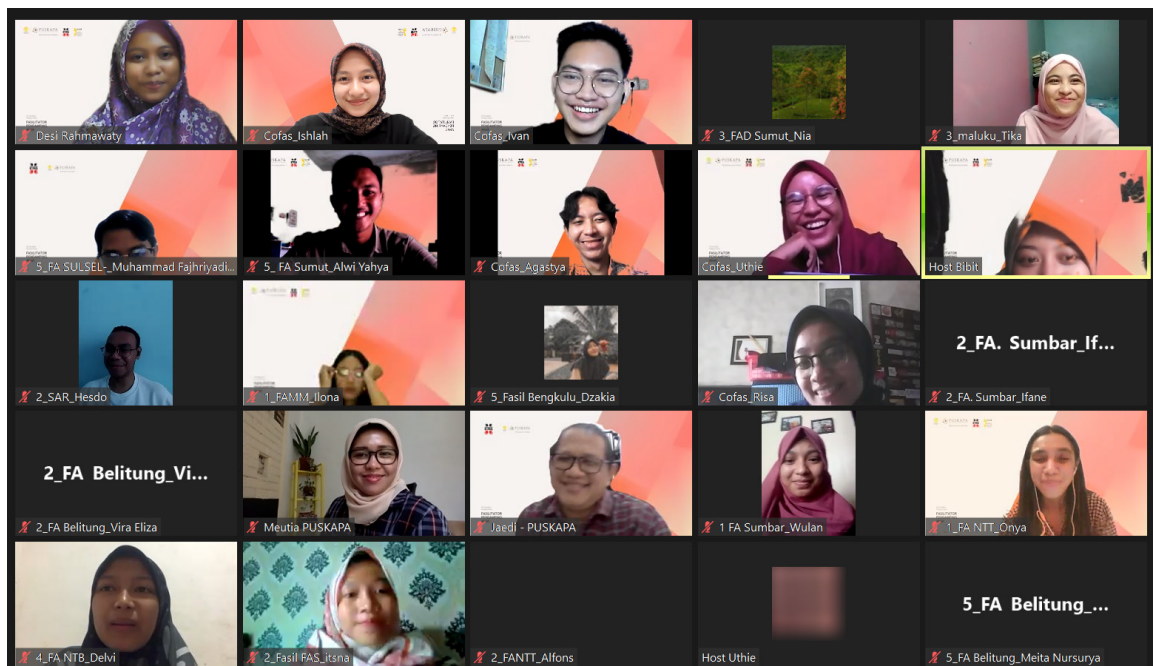
Program PN Prima memiliki 4 tujuan utama. Pertama, surveilans COVID-19 untuk memastikan capaian 3T tetap tinggi. Kedua, vaksinasi bagi kelompok rentan dengan prioritas seperti lansia, orang dengan

komorbiditas, dan kelompok yang termarginalkan secara sosial yakni kelompok paling terdampak lebih parah jika mereka terkena COVID-19. Ketiga, mengembalikan ketersediaan layanan kesehatan esensial yang terdampak semasa penanggulangan COVID-19, khususnya pada layanan penyakit kronis, KIA dan pengobatan TB/HIV. Keempat, pelibatan kader kesehatan secara bermakna untuk membantu Puskesmas dalam mencapai target-target yang telah ditentukan.

Peningkatan Kapasitas

1

Pelatihan Fasilitator Sahabat Kapas



Sebagai tindak lanjut *Training Need Analysis* (TNA) yang telah dilakukan terhadap Fasilitator Sahabat Kapas pada Desember 2020, PUSKAPA dan mitra Sahabat Kapas menyusun Modul *Training of Trainer* (TOT). Merujuk pada hasil TNA, materi TOT disusun untuk meningkatkan keahlian Fasilitator Sahabat Kapas dalam hal fasilitasi, komunikasi dan advokasi serta meningkatkan pengetahuan mengenai isu perlindungan anak, akses pada keadilan, inklusi sosial, pencatatan sipil, partisipasi kaum muda dan isu-isu terkait lainnya.

Penyusunan materi mempertimbangkan skenario pelatihan secara luring dan daring. Dalam situasi daring, pelatihan dapat dilakukan secara *Split Teams*, *Hybrid Teams*, *Remote Teams* dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

PUSKAPA dan Sahabat Kapas telah menyelesaikan sebagian materi dan dalam tahap mengembangkan materi lainnya. Untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang telah selesai dikembangkan, dilakukan uji coba terhadap dua materi, yakni Prinsip Mendampingi dan Bekerja dengan Anak Akses pada Keadilan. Uji coba yang dilakukan pada September 2021 ini melibatkan para pendamping anak yang berada dalam jaringan Sekolah Advokasi Remaja Sahabat Kapas.

2

Program Peningkatan Kapasitas Jurnalis AJI terkait Isu Adminduk

Webinar Diseminasi
Penguatan Administrasi Kependudukan dan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Melalui Jurnalisme
 AJI - PUSKAPA
 Kamis, 27 Januari 2022
 13.00 - 15.00 WIB

Fasilitas
 • Juru Bahasa Iyarak
 • Sertifikat
 • Live transcript

Presentasi Hasil Peliputan
 • Transpuna Punya KTP Alvi AH (konde.co)
 • Nasib ODG-J Jalanan Khoirul Muzakki (Tribun Jateng)
 • Jalan Liku Penghayat Hartatik (Suara Merdeka)

Diskusikan Bersama Gubernur dan Mentor
 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (dalam konfirmasi)
 Adib Muttaqin Asfar (Mentor)

Pendaftaran: bit.ly/webinarPUSKAPA-AJI
 Terbuka untuk jurnalis dan umum

Webinar Diseminasi
PENGUATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI SELATAN MELALUI JURNALISME
 AJI - PUSKAPA
 Rabu, 2 Februari 2022
 10.00-12.00 WITA

Presentasi Hasil Peliputan
 Andi Nur Isman Sofyan (Sindo Makassar)
 Hamdani Sahanuna (Harian FAJAR)
 Kasmira (Rakyat.News)

Penanggung
 Pti Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (dalam konfirmasi)
 Muhammad Yusuf AR (Mentor)

Fasilitas
 Juru Bahasa Iyarak
 E-sertifikat
 Transcript

Pendaftaran: <http://bit.ly/adminduksel>

WEBINAR DISEMINASI
"Penguatan Administrasi Kependudukan dan Penanggulangan Kemiskinan melalui Jurnalisme di Jawa Timur"

Presentasi Hasil Liputan :
 • Wafiq Agung (Kabartenggaek.com)
 • "Si Nduk" Permuda (Program Adminduk)
 • "Nasib Penderita" (Penerbit Banteng)

Penanggung
 • Khofifah Inder Parawansa* (Gubernur Jatim) (dalam konfirmasi)
 • Hani Tri Wasono (Mentor)
 • Rina Hayati (AJI Kediri)

Fasilitas :
 • Juru Bahasa Iyarak
 • E-sertifikat
 • Live Transcript

Pendaftaran: bit.ly/admindukjatim
 Terbuka untuk jurnalis dan umum
 CP: 081.933.9111.271 | Tahun Daily

OPEN RECRUITMENT
WORKSHOP: "ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KEMISKINAN"

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan dukungan Pusat Kajian dan Advokasi Perencanaan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), mengundang Anda untuk mengikuti program Workshop dan Fellowship "Administrasi Kependudukan dan Kemiskinan". Program ini bertujuan untuk mendorong jurnalis berkualitas dalam melaporkan isu administrasi kependudukan dan kemiskinan serta mendorong advokasi atas akses dan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemberitaan media massa.

Durasi Program
 Kegiatan akan dilaksanakan secara daring sebanyak 4 (empat) sesi dalam tiga hari dengan kluster sebagai berikut:

1. Sulawesi Selatan (2-4 November 2021)
2. Jawa Tengah (9-11 November 2021)
3. Jawa Timur (16-18 November 2021)

Silapa yang dapat menjadi peserta?
 • Jurnalis lokal aktif yang berdasarkan di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tertarik pada isu administrasi kependudukan dan kemiskinan.
 • Berkecenderungan untuk mengikuti sesi secara penuh (seluruh 4 sesi dalam 3 hari).
 • Sebisa mungkin bersedia menggunakan laptop serta akses internet yang memadai.

Bagaimana cara menjadi peserta kegiatan ini?
 • Bekerja sebagai jurnalis.
 • Bekerja sebagai mahasiswa.
 • Bekerja sebagai dosen.
 • Bekerja sebagai pegawai negeri.
 • Bekerja sebagai pengusaha.
 • Bekerja sebagai karyawan.
 • Bekerja sebagai wirawan.
 • Bekerja sebagai freelancer.
 • Bekerja sebagai konsultan.
 • Bekerja sebagai peneliti.
 • Bekerja sebagai akademisi.
 • Bekerja sebagai praktisi.
 • Bekerja sebagai aktivis.
 • Bekerja sebagai relawan.
 • Bekerja sebagai sukarelawan.
 • Bekerja sebagai relawan sosial.
 • Bekerja sebagai relawan lingkungan.
 • Bekerja sebagai relawan kemanusiaan.
 • Bekerja sebagai relawan kesehatan.
 • Bekerja sebagai relawan pendidikan.
 • Bekerja sebagai relawan budaya.
 • Bekerja sebagai relawan seni.
 • Bekerja sebagai relawan olahraga.
 • Bekerja sebagai relawan pariwisata.
 • Bekerja sebagai relawan teknologi.
 • Bekerja sebagai relawan komunikasi.
 • Bekerja sebagai relawan media.
 • Bekerja sebagai relawan komunikasi massa.
 • Bekerja sebagai relawan komunikasi publik.
 • Bekerja sebagai relawan komunikasi organisasi.
 • Bekerja sebagai relawan komunikasi interpersonal.
 • Bekerja sebagai relawan komunikasi intrapersonal.

Apakah yang didapatkan sebagai peserta?
 • Sertifikat
 • Subsidi internet
 • Materi pendahabang
 • Kesempatan untuk mendapatkan beasiswa liputan mendalam tentang isu administrasi kependudukan dan kemiskinan sebesar Rp 5.000.000,- untuk 5 proposal tiap kluster.

Perlu informasi lebih lanjut?
 Jika rekan-rekan membutuhkan informasi lebih lanjut terkait topik ataupun informasi lainnya, silakan mengirim email ke: info@puskapa.org dengan subjek: Workshop Adminduk.

Dalam rangka mendorong jurnalis berkualitas dan mendorong advokasi terkait isu akses dan pelayanan administrasi kependudukan melalui pemberitaan di media massa, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan PUSKAPA menggelar program pelatihan jurnalistik bagi jurnalis lokal dengan tema "Administrasi Kependudukan dan Kemiskinan". Pelatihan ini untuk mendorong kualitas pemberitaan mengenai sistem administrasi kependudukan di tiga wilayah yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini dijalankan dengan memberikan pembekalan terhadap jurnalis lokal atas isu administrasi kependudukan dan kemiskinan melalui rangkaian lokakarya, fellowship, mentoring dan publikasi hasil liputan di media.

Lokakarya daring dilaksanakan selama tiga hari secara simultan di tiga kluster dengan mengundang pemateri dari PUSKAPA, Bappenas, serta jurnalis senior yang berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada peserta secara intensif mengenai isu administrasi kependudukan dan kemiskinan. Setelah lokakarya selesai, peserta diminta untuk menyusun proposal liputan mendalam tentang isu administrasi kependudukan dan kemiskinan. Dari proposal tersebut, AJI bersama PUSKAPA memilih 5 proposal liputan terbaik dari masing-masing kluster.

Selanjutnya, peserta yang proposalnya terpilih mendapatkan mentoring. Selama 1 bulan, jurnalis terpilih melakukan liputan dan didanai oleh AJI. Dua hingga tiga artikel hasil peliputan terbaik di masing-masing wilayah akan memaparkannya dalam sesi webinar dan berdialog dengan pemerintah daerah setempat.

3

Paket Pembelajaran: Mengenal Perlindungan Anak Dasar MOOC



Paket Pembelajaran Mengenal Perlindungan Anak Dasar (PAD) bertujuan untuk mengenalkan dan menerapkan cara pandang perlindungan anak dalam memaknai dan mendiskusikan masalah-masalah sosial, dan dalam menjalankan peran profesional sehari-hari. Paket pembelajaran ini mendiskusikan sejumlah literatur dan bukti-bukti ilmiah yang membentuk kerangka pemikiran perlindungan anak, dari Indonesia dan negara-negara lain.

Paket pembelajaran ini dirancang sebagai kursus daring di Universitas Indonesia (UI). Prosesnya merupakan hasil kerja sama PUSKAPA dan Departemen Kriminologi FISIP UI. Meski dirancang bersama Departemen Kriminologi, penerapan cara pandang perlindungan anak dalam kebijakan dan praktik tidak terbatas pada sektor hukum, penegakan hukum, peradilan, dan pencegahan serta penanganan kejahatan, namun secara luas berlaku di berbagai sektor sosial, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, politik, komunikasi, pendidikan, dan berbagai peran yang terkait.

Paket pembelajaran terdiri dari 12 modul dan 12 video pembelajaran. Setiap modul menyediakan informasi mendasar secara singkat dan rujukan-rujukan referensi yang memandu Anda untuk mengembangkan bacaan yang relevan secara mandiri. Setiap Modul ditemani dengan satu video pembelajaran berdurasi sekitar delapan menit. Modul dan video tersebut baru bisa digunakan oleh peserta MOOC (*Massive Open Online Course*) milik UI.

4

Beragam Pelatihan terkait Administrasi Kependudukan

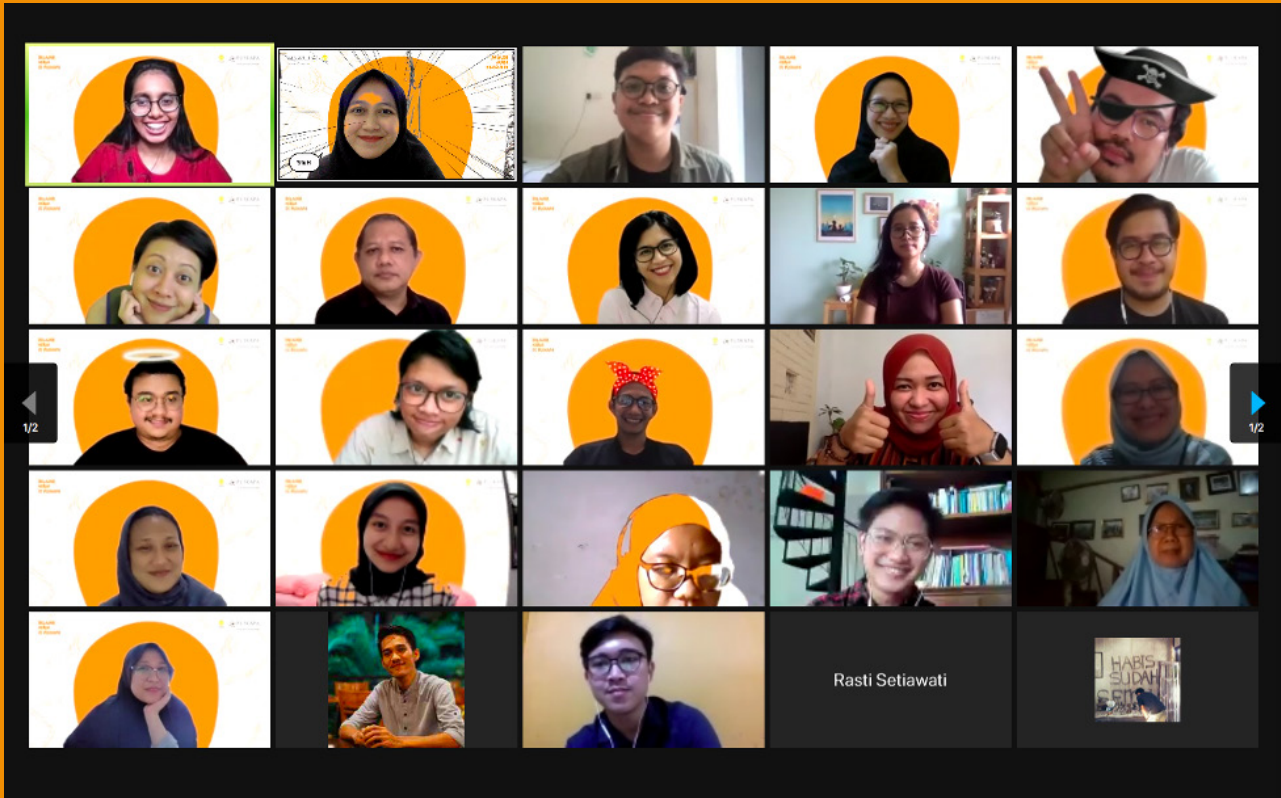
Selain kegiatan peningkatan kapasitas yang disebutkan di atas, PUSKAPA juga terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan, pemberian bantuan teknis, penyusunan peraturan di daerah dan nasional, hingga memberi masukan terhadap berbagai kurikulum yang terkait dengan isu perlindungan dan kesejahteraan anak dan kelompok rentan, identitas hukum, hingga penganggaran program berperspektif anak.

Selama 2021, tercatat setidaknya 25 pelatihan dan lokakarya diberikan oleh PUSKAPA untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, jurnalis dan fasilitator daerah terkait layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan lain-lain.

1. Pelatihan Penyegaran PS2H Kepada Master Trainer
2. Pelatihan Fasilitator PS2H Level Desa di Kabupaten Trenggalek
3. Pelatihan Fasilitator PS2H Level Desa di Kabupaten Lumajang
4. Pelatihan Master Trainer Fasilitator LABKD Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Pelatihan Master Trainer Koordukcapil Provinsi Sulawesi Selatan
6. Refreshment Pelatih Fasilitator Admindak Desa Kabupaten Pemalang
7. Pelatihan Master Trainer LABKD NTB
8. Lokakarya Penganggaran LABKD di Desa
9. Pelatihan Tenaga Pelatih Fasilitator Administrasi Kependudukan Desa Kabupaten Pemalang
10. Pelatihan Tenaga Pelatih Kader Kampung Kabupaten Manokwari Selatan
11. Lokakarya Finalisasi Menu Integrasi Data Dapodik Dinas Pendidikan
12. Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja 3 Stranas AKPSH Untuk Percepatan Layanan Admindak Bagi Penduduk Dalam Situasi Bencana
13. TOT Kader Kampung di Nabire
14. Peningkatan Kapasitas Jurnalis Sulawesi Selatan
15. TOT Fasilitator PASH Jawa Tengah (Pekalongan, Brebes, dan Provinsi)
16. Peningkatan Kapasitas Jurnalis Jawa Tengah
17. Lokakarya Pendataan Kelompok Rentan Admindak Kabupaten Pacitan
18. Peningkatan Kapasitas Jurnalis Jawa Timur
19. Pelatihan Master Trainer Kader PKK untuk Fasilitator LABKD Pulau Lombok
20. Pelatihan Kader Kampung dan Kesehatan Kabupaten Fakfak
21. Penguatan Kapasitas PTPD Kabupaten Brebes untuk Memfasilitasi Penyusunan RKP dan APB Desa Tahun 2022 yang Inklusif dan Responsif Pelayanan
22. *Refreshment Training* Pelatih Koordukcapil Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkep dan Provinsi
23. TOT Pelatih Koordukcapil Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo
24. Peningkatan Kapasitas Koordukcapil untuk Pemutakhiran Data Penduduk Desa/Kelurahan Menggunakan Aplikasi SIADEK Versi 2 Kabupaten Bantaeng
25. Pelatihan Master Trainer Kader PKK untuk Fasilitator LABKD Pulau Sumbawa

PROGRAM BELAJAR KERJA DI PUSKAPA ANGKATAN KE - 3

Pada bulan Maret-Juni 2021, PUSKAPA kembali menyelenggarakan Program Belajar Kerja di PUSKAPA untuk Angkatan Ketiga (Program BKdP III). Program BKdP III diselenggarakan untuk memperkenalkan isu-isu perlindungan anak khususnya dan isu-isu pembangunan pada umumnya kepada mahasiswa Strata 1 yang telah memasuki semester 6. Program ini dilakukan sepenuhnya secara daring karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan secara tatap muka.



Selama empat bulan, empat mahasiswa tersebut mengeksplorasi tiga pilar utama PUSKAPA, yakni Perlindungan dan Inklusi Sosial, Identitas Hukum dan CRVS, Akses pada Keadilan, serta dengan tim Trifecta (Riset, Pemantauan dan Evaluasi, Manajemen Pengetahuan, dan Komunikasi).

Program BKdP III menerapkan sistem rotasi, sama seperti BKdP sebelumnya. Peserta berada di Pilar dan Trifecta selama masing-masing tiga minggu, kemudian peserta memilih Pilar atau Trifecta yang akan diperdalam selama empat minggu terakhir. Peserta, mentor, dan pengelola melakukan debriefing setiap minggu terakhir rotasi. Pada debriefing ini, peserta dan mentor berbagi tentang kegiatan yang dilakukan dan refleksi selama berada di Pilar dan Trifecta.

Selain rotasi Pilar dan Trifecta, peserta juga mengikuti berbagai kegiatan lain seperti sesi berbagi bersama direktur, mini workshop mengenai advokasi, meninjau regulasi, dan komunikasi, serta sesi diskusi bersama alumni BKdP I dan II.



BERBAGI PENGETAHUAN & PEMBELAJARAN

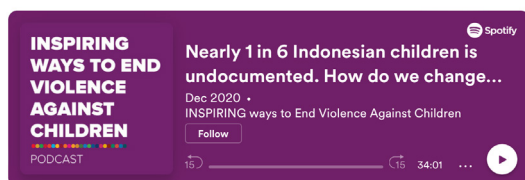
Webinar Pembelajaran

Webinar Pembelajaran PUSKAPA adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau didukung PUSKAPA yang bertujuan untuk mendiskusikan berbagai hal seputar perlindungan dan kesejahteraan anak dan kelompok rentan di Indonesia yang terbuka untuk umum. Dalam Webinar Pembelajaran PUSKAPA, peserta dapat berinteraksi dengan pakar-pakar dari dalam dan luar negeri, mulai dari akademisi hingga pembuat kebijakan, dari praktisi sampai tokoh masyarakat sipil, yang membagikan bukti ilmiah terbaru mereka, transformasi kebijakan atau pembelajaran yang didapat dari dunia nyata.

1 Narasumber Podcast

Hampir sekitar 1 dari 6 anak Indonesia tidak tercatat. Bagaimana kita mengubahnya? Bersama Santi Kusumaningrum

NEARLY 1 IN 6 INDONESIAN CHILDREN IS UNDOCUMENTED. HOW DO WE CHANGE THAT? WITH SANTI KUSUMANINGRUM



Tap/klik gambar di atas untuk mendengarkan podcast.

Dalam episode podcast ini, Santi Kusumaningrum (Direktur PUSKAPA) berbagi pengetahuan terkait situasi dan kebutuhan anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas hukum, serta bagaimana data yang baik dan solusi berbasis bukti dapat mengubah situasi ini untuk anak-anak Indonesia.

Seri podcast Inspiring Way to End Violence merupakan sesi diskusi eksploratif bersama para ahli, peneliti dan tokoh yang bekerja untuk perlindungan dan kesejahteraan anak.

2 Seminar Global

Dampak COVID-19 terhadap Anak dan Kelompok Rentan (ANU Indonesia Project)



Tap/klik gambar di atas untuk menyaksikan video rekaman kegiatan.

Bappenas, PUSKAPA, UNICEF, dan KOMPAS telah menerbitkan Kajian Kebijakan: Berkejaran dengan Waktu untuk Mengatasi dan Mencegah Dampak COVID-19 pada Anak dan Individu Rentan pada 2020 lalu. Santi Kusumaningrum (Direktur PUSKAPA) menjadi salah satu pembicara utama dalam dalam webinar global yang diadakan oleh Australian National University (ANU) ini.

Selain Santi, Maliki (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas) dan Woro Sri Sulistyningrum (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, & Olahraga, Bappenas) juga memberikan tanggapan kebijakan terkait. Maliki berfokus memberikan tanggapan terkait isu kemiskinan dan perlindungan sosial, sementara Woro Sri Sulistyningrum akan berbagi tanggapan terkait perlindungan untuk anak-anak rentan dan keluarga.

10 MAR 2021

3 SNF EduCast

Kebiri Kimia dan Payung Hukum Kekerasan Seksual Anak



Tap/klik gambar di atas untuk mendengarkan podcast.

Muhammad Bill Robby (Peneliti PUSKAPA) mendapat kesempatan berbicara tentang kebiri kimia dan payung hukum kekerasan seksual terhadap anak dalam seri podcast SNF (Sekolah NonFormal) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). SNF FEB UI merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya memberikan pengajaran kepada anak-anak kelas 5 SD di lingkup Universitas Indonesia dan memberikan edukasi terkait pendidikan dan anak-anak kepada masyarakat umum.

11 MAR 2021

4 Talking Indonesia

COVID-19, Anak-anak dan Individu Rentan



Tap/klik gambar di atas untuk mendengarkan podcast.

Santi Kusumaningrum (Direktur PUSKAPA) berbagi pengetahuannya terkait dampak COVID-19 terhadap anak-anak dan individu rentan di Indonesia dalam seri podcast Talking Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia at Melbourne. Indonesia at Melbourne adalah inisiatif bersama Fakultas Seni di Asia Institute, Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) di Melbourne Law School, dan Forum Indonesia di University of Melbourne.

5 PUSKAPA di Talkshow SEA Today

Perkawinan Anak di Indonesia



Tap/klik gambar di atas untuk menyaksikan video rekaman kegiatan.

Andrea Adhi, Lead for Social Inclusion and Protection PUSKAPA diundang oleh SEA Today News untuk berbicara tentang situasi pernikahan anak di Indonesia. Mereka membahas bagaimana pernikahan anak merupakan masalah multidimensi, dimana faktor ekonomi, pendidikan, tempat tinggal (pedesaan vs perkotaan), dan budaya terkait erat dengan pernikahan anak. Berikut adalah beberapa pesan utama dari talkshow tersebut:

- Di Indonesia, kasus pernikahan pada anak perempuan terjadi lebih banyak dibandingkan pada anak laki-laki. Menurut data SUSENAS 2019, 1 dari 9 wanita menikah sebelum usia 18 tahun, sedangkan untuk pria 1 dari 100.
- Pernikahan anak memiliki banyak konsekuensi, salah satunya terkait kesempatan mendapatkan pendidikan. Studi PUSKAPA menunjukkan wanita yang menikah dini memiliki partisipasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah di usia lebih tua. Hal ini dapat menyebabkan wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki pekerjaan bergaji lebih rendah dan meningkatkan risiko untuk hidup dalam kemiskinan. Selain itu perkawinan anak juga bisa menyebabkan kehamilan berisiko tinggi, yang bisa berbahaya bagi ibu dan bayinya.

26 NOV 2021

6 Webinar Penelitian dan Ilmu Sosial di Era Pandemi ARC X PUSKAPA

Webinar #1

Penelitian Sosial dan Pengambilan Kebijakan di Masa Pandemi

Pemateri

- Dr. Panji Anugrah**
Asia Research Centre, Universitas Indonesia (ARC UI)
- Clara Siagian, PhD(c)**
Pusat Kajian dan Advokasi Pembelajaran dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)
- Dr. Ricardi S. Adnan**
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP)

Penanggap

- Ir. Suharti, MA, PhD**
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Maliki, ST, MSIE, Ph.D**
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas

Moderator

- Diatyka W P Yasih, PhD(c)**
Asia Research Centre, Universitas Indonesia (ARC UI)

Jumat, 26 November 2021
09.00-11.00 WIB Zoom Webinar

Tautan Registrasi: bit.ly/GDN-ID

Tap/klik gambar di atas untuk menyaksikan video rekaman kegiatan.

PUSKAPA berkolaborasi dengan Asia Research Centre Universitas Indonesia (ARC UI) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) dalam seri webinar yang membahas bagaimana situasi pandemi memengaruhi riset ilmu sosial.

ARC UI, PUSKAPA dan LPPSP berargumen bahwa kontribusi penelitian dan ilmu sosial dalam dan tentang pandemi ada pada kemampuannya menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan menyeimbangkan relasi kuasa antara ilmuwan, pengambil kebijakan, dan warga. Jika efektif, kontribusi ini dapat mendasari kebijakan penanganan dan pemulihan pasca pandemi yang mampu menyetarakan kesempatan bertahan hidup dan berkembang, memitigasi dampak buruk pandemi bagi mereka yang paling membutuhkan, mengantisipasinya di masa yang akan datang, dan tidak menimbulkan kerentanan baru.

Pada seri pertama webinar, selain peneliti-peneliti dari PUSKAPA, ARC UI dan LPPSP yang memberikan paparan, perwakilan dari pemerintah pun berpartisipasi dan memberikan tanggapan yang bermakna. Kegiatan webinar dibuka oleh Dekan FISIP UI Arie S. Soesilo yang bercerita bagaimana penelitian sosial dan politik tidak dapat dipisahkan dari proses perumusan kebijakan yang meliputi aktor-aktor dan mobilisasi sumber daya lembaga untuk memastikan riset yang dijalankan bermanfaat bagi masyarakat.

Diskusi Brownbag

Di PUSKAPA, kami tidak pernah berhenti belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Melalui kegiatan diskusi brown bag (Brown Bag Discussion/BBD), kami mengundang pembicara, baik staf PUSKAPA atau dari luar PUSKAPA untuk berbagi pengetahuan baru kepada kami. Topik diskusi tidak terbatas dan dapat berasal mulai dari pembelajaran riset dan advokasi, pelatihan atau lokakarya yang baru kami hadiri sampai ke pendekatan baru dalam ranah penelitian; dari sebuah publikasi baru sampai ke artikel pemikiran mengenai isu-isu terkini di Indonesia maupun dunia.

2 FEB 2021

Digitalisasi Monograf Desa

Dinar Dana Kharisma (Staf Perencana pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas RI)

16 FEB 2021

Mengenal Lebih Jauh Isu Image Based Sexual Abuse dan Keterlibatan Anak Pada Terorisme di Indonesia

Johanna Poerba (Staf magang PUSKAPA)

4 MAY 2021

Seri Belajar Analisis Regulasi #0

Feri Sahputra (Lead for Access to Justice PUSKAPA)

26 JUL 2021

Kualitas Kesehatan Udara dan Pengaruhnya terhadap Perlindungan Anak dan Semua

Piotr Jakubowski (Co Founder Nafas)

30 JUL 2021

Seri Belajar Analisis Regulasi #1

Feri Sahputra (Lead for Access to Justice PUSKAPA)

26 AUG 2021

Seri Belajar Analisis Regulasi #2

Putri Amanda (Head of Programs PUSKAPA)

21 OKT 2021

Sekolah Ilmu Keluarga

Ishlah Fitriani dan Asep Ridwan Wahyudi (Peserta Program BKdP)

6 DES 2021

Berbagi Pengalaman Opinion Survey

Heggy Kearens & Nifadhilah Sofiassalam (C4C)

13 DES 2021

Sarah's final project presentation

Sarah Hannah (Staf Magang PUSKAPA)

KAMI MENGEMBANGKAN KAPASITAS STAF INTERNAL

Selama 2021, kami memberikan 9 kesempatan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas yang menunjang bekerja kepada tim teknis maupun tim operasional PUSKAPA. Satu diantaranya dilakukan secara *offline*, dan selebihnya dilakukan secara *online* (daring).

Tanggal

Informasi Pelatihan/Lokakarya

Jan - Des 2021	Lokakarya Kesehatan Mental: Life Kit oleh David W. Elsey
19 Jan 2021	Mini Workshop Teknik Penulisan Artikel Ilmiah Populer oleh TCID
Feb - Apr 2021	<i>Epidemiology and Modeling Infectious Diseases in the Humanitarian Setting</i> oleh United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
23 Jan 2021	Pelatihan Penyuntingan Bahasa Dasar untuk Editor oleh Narabahasa
27 Jan 2021	Pelatihan Perangkaan Kalimat oleh Narabahasa
15-19 Feb 2021	<i>Social Norms Training</i> oleh The London School of Hygiene & Tropical Medicine
10 Mar 2021	Lokakarya Strategi Advokasi oleh C4C
Apr 2021	Pelatihan Presentasi untuk Staf Operations oleh C4C
Jun 2021	Pelatihan Akuntansi untuk Staf Keuangan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI

KAMI MENGEMBANGKAN KAPASITAS MITRA-MITRA KERJA KAMI DAN MASYARAKAT UMUM

Selama 2021, kami memberikan beragam pelatihan atau menjadi narasumber kepada mitra kerja dan masyarakat umum secara daring (*online*). Selain menjadi pelatih, narasumber atau fasilitator, kami juga berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sosialisasi terkait COVID-19.

Tanggal	Informasi Pelatihan	Narasumber/Pemateri/ Fasilitator/Pelatih dari PUSKAPA
14 APR 2021	Kuliah Umum Statistik 2 Fakultas Psikologi Universitas Sanata Darma	Windy Liem
20 MAR 2021	Nge-KOS: Kelas Online Santai Episode 1: Meaningful Youth Participation	Ryan Febrianto
29 APR 2021	Target's Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) talks	Santi Kusumaningrum
30 JUL 2021	Book Chapter Talk "Systems Thinking to Break the Cycle of Invisibility: Lessons learned from a vital registration strengthening program in 16 districts in Indonesia" for St. Jude's NexPoS (Nexus of Policies and Systems)	Santi Kusumaningrum, Widi Laras Sari dan Rahamdi Usman
9 JUN 2021	Monash Indonesia Seminar Series	Santi Kusumaningrum
29 JUL 2021	Diseminasi Analisis Anggaran Berorientasi Anak	Andrea Adhi
14 AGU 2021	Webinar Peringatan Hari Anak Nasional Amnesty Unair	Windy Liem
15 AGU 2021	Talkshow Letsstalk	Santi Kusumaningrum
20 AGU 2021	Women and Children Protection Public Lecture ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada	Santi Kusumaningrum
18 AGU 2021	Menagih Janji Vaksinasi	Clara Siagian
7 SEP 2021	Child Online Safety During The Pandemic	Putri Kusuma Amanda
27 SEP 2021	Webinar Realitas Pekerja Anak	Shaila Tieken
6 OKT 2021	Narasumber FGD dalam pembuatan ebook parenting: buku panduan u/ generasi pandemi	Ni Luh Putu Maitra Agastya
4-8 OKT 2021	Annual Meeting for Child Protection in Humanitarian Action Alliance	Santi Kusumaningrum
12 OKT 2021	Narasumber Pelatihan Hukum Dasar Bagi Pegawai LPSK	Feri Sahputra
19 OKT 2021	Panelist Intersections between Violence Against Children and Violence Against Women	Santi Kusumaningrum

Tanggal	Informasi Pelatihan	Narasumber/Pemateri/ Fasilitator/Pelatih dari PUSKAPA
21 DES 2021	Dosen tamu [Mengajar Non-UI]: UGM Elective course on adolescent health	Santi Kusumaningrum
16 NOV 2021	KSIXChange X ALMI Scientist Series	Santi Kusumaningrum
18 NOV 2021	Narasumber Workshop “Hak Sipil Anak-Anak Pengungsi Dari Luar Negeri.” (BRIN)	Santi Kusumaningrum
26 NOV 2021	ARC X PUSKAPA Webinar Penelitian Sosial dan Pengambilan Kebijakan	Clara Siagian
11 DES 2021	Policy Fest: “Breaking Boundaries In Indonesian Public Policy.”	Santi Kusumaningrum
21 DES 2021	Dosen tamu di blok elektive Adolescent Health in Public Health Perspective dari Prodi S1 Kedokteran FK-KMK UGM (Marginalized Adolescents (Adolescents in Armed Conflict, Displaced Adolescents, and Adolescents of Minority Group))	Santi Kusumaningrum
9 DES 2021	Conversation #6 – Reconstructing Children’s Rights Institute	Santi Kusumaningrum
8 DES 2021	Dosen Pengajar Tamu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Putri Kusuma Amanda
19 DES 2021	Webinar “What to Do Next: Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia”. Universitas Diponegoro	Ryan Febrianto

PROGRAM MAGANG DAN PRAKTIKUM

PUSKAPA memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan lulusan baru (baik dari dalam maupun luar negeri) yang ingin melakukan magang di PUSKAPA dengan periode tertentu selama 2021. Beberapa peserta magang tersebut adalah:

1

Sarah Hannah

Mahasiswi Fakultas Psikologi
Universitas Gadjah Mada (UGM)

2

Ferny Prayitno

Alumni Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Indonesia (STIH) Jentera

3

Johanna Poerba

Alumni Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia (STHI) Jentera

SUMBER DAYA DI 2021

Tahun ini kami
mengelola dana sebesar

Rp13,75 miliar

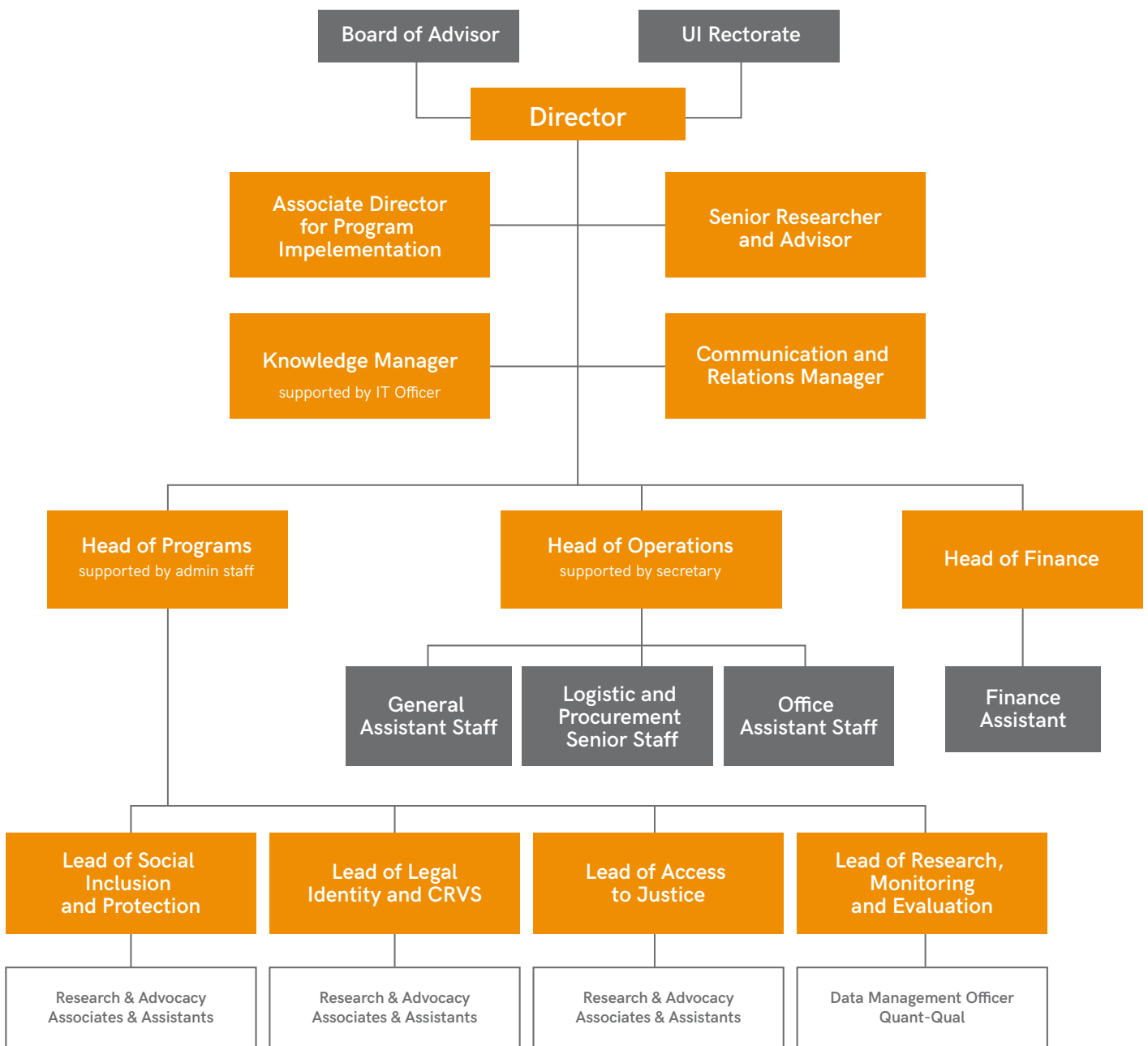




KAPASITAS KELEMBAGAAN



Struktur Organisasi



Staf PUSKAPA

1. **Santi Kusumaningrum**
Director and Principal Investigator
2. **Muhammad Jaedi**
Associate Director for Program Implementation
3. **Putri Kusuma Amanda**
Head of Programs
4. **Khatimah Poniman**
Head of Operations
5. **Dalimaya Purwanto**
Head of Finance
6. **Harriz Jati**
Knowledge Manager
7. **Marsha Habib**
Communication and Relations Manager
8. **Ni Luh Putu Maitra Agastya**
Senior Researcher
9. **Clara Siagian**
Senior Researcher
10. **Widi Laras Sari**
Lead for Research, Monitoring and Evaluation
11. **Andrea Andjaringtyas Adhi**
Lead for Social Inclusion and Protection
12. **Rahmadi Usman**
Lead for Legal Identity and CRVS
13. **Feri Sahputra**
Lead for Access to Justice
14. **Wenny Wandasari**
Research and Advocacy Associate
15. **Windy Liem**
Research and Advocacy Associate
16. **Nadira Irdiana**
Research and Advocacy Associate
17. **Ryan Febrianto**
Research and Advocacy Associate
18. **Cendy Adam**
Research and Advocacy Associate
19. **Eriando Rizky Septian**
Research and Advocacy Associate
20. **Shaila Tiekem**
Research and Advocacy Associate
21. **Meutia Aulia Rahmi**
Research and Advocacy Assistant
22. **Muhammad Bill Robby**
Research and Advocacy Assistant
23. **Qodri Azizi Akbar**
Research and Advocacy Assistant
24. **Siti Ainun Nisa**
Research and Advocacy Assistant
25. **Jaya Wina Santiya**
Research and Advocacy Assistant
26. **Petty Handani**
Procurement and Logistic Officer
27. **Trinia Prabawani**
Finance Assistant
28. **Abrurizal Wicaksono**
Finance Assistant
29. **Yanti Nurhayati**
Administrative Assistant
30. **Yulianti**
Administrative Assistant
31. **Rasti Setiawati**
Office Affair Assistant

Dewan Penasihat Kami

1. **Irwanto**
Chair for PUSKAPA's Board of Advisors
2. **Arie Setiabudi Soesilo**
Dean of the Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia
3. **Pungky Sumadi**
Deputy For Demography and Manpower, Bappenas
4. **Agustinus Pohan**
Lecturer and Legal Practitioner, Parahyangan Catholic University
5. **Nina Sardjunani**
Mentor, National SDGs Secretariat, Bappenas
6. **Herawati Sudoyo**
Expert and Founder, Eijkman Institute
7. **Ni Made Martini Puteri**
Lecturer and Head of Department of Criminology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia



TERIMA KASIH BANYAK, MITRA PUSKAPA

Kami ingin berterima kasih pada para mitra kami, yang telah memungkinkan kami untuk melakukan apa yang kami kerjakan setiap hari melalui kolaborasi dan dukungannya.

Pada tahun 2021, secara resmi kami bermitra dengan UNICEF Indonesia, KOMPAK, SurveyMETER, Columbia University, CISDI, IJRS, ICJR, Australian National University, Bank Dunia, Sahabat Kapas, C4C lewat Latih Logika, MAHKOTA, dan mitra-mitra lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

#Fair Chance For All Children

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan
& Kualitas Hidup Anak
(Center on Child Protection and Wellbeing)

T (021) 78849181
F (021) 78849182
www.puskapa.org



@puskapa



@puskapa

Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1
Kampus UI, Depok, 16424